



Jasiora : Vol 2 No 4 Juni 2018

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admgr/index>)



Pelaksanaan Koordinasi Pemerintah Daerah Dan Perusahaan Listrik Negara Dalam Pengadaan Jaringan Listrik Daerah Pedesaan

Fajar Ifan Dolly¹, Asra'i Maros², Ade Sofa³, Aisyah⁴

¹STIA Setih Setio Muara Bungo

²STIA Setih Setio Muara Bungo

³STIA Setih Setio Muara Bungo

⁴STIA Setih Setio Muara Bungo

Info Artikel

Masuk: 15 April 2018

Diterima: 29 Mei 2018

Terbit: 15 Juni 2018

Keywords:

Coordination, Procurement of Rural Area Electricity Network.

Kata kunci:

Koordinasi, Pengadaan Jaringan Listrik Daerah Pedesaan.

Abstract

The purpose of this research is to know how the implementation of coordination of local government and PLN in procurement of rural area electricity network. Besides, also to know what constraints faced by local government and PLN in procurement of rural electricity network. And to know what efforts are made by the local government and PLN in the procurement of rural electricity network. The research used is descriptive approach with qualitative method. The research population is the manager and chief technician of PT. PLN, Head of Bappeda and Head of Facilities and Infrastructure, while samples taken as many as eight people. The results showed that the implementation of Bappeda and PT PLN coordination in the procurement of rural power network in theory has been running well, but in practice has not been effective because there are still villages that do not have electricity network and there are still people who have not yet electricity. The obstacles faced by Bappeda are not having direct policy to build rural power network. While the obstacles faced by PT. PLN is PLN hoping the government to affirm the policy on land acquisition, lack of socialization by PLN, low population density and geographic factors that are difficult to reach. The efforts made by Bappeda and PLN are to improve regulatory standards for the preparation, management, supervision, and procedures for the provision of rural power networks, village funds, to create specific policies governing the procurement of rural and village electricity networks that have not been powered by electricity.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan koordinasi pemerintah daerah dan PLN dalam pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan. Selain itu juga untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan PLN dalam pengadaan jaringan listrik

*Corresponding Author:
Fajar Ifan Dolly*

pedesaan. Dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan PLN dalam pengadaan jaringan listrik pedesaan. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Populasi penelitian adalah manajer dan kepala teknisi PT. PLN, Kepala Bappeda dan Kepala Sarana dan Prasarana, sedangkan sampel diambil sebanyak delapan orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi Bappeda dan PT PLN dalam pengadaan jaringan listrik pedesaan secara teori telah berjalan dengan baik, tetapi dalam praktiknya belum efektif karena masih ada desa yang belum memiliki jaringan listrik dan masih ada masyarakat yang belum listrik. Hambatan yang dihadapi Bappeda adalah tidak memiliki kebijakan langsung untuk membangun jaringan listrik pedesaan. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh PT. PLN adalah PLN berharap pemerintah untuk menegaskan kebijakan pembebasan lahan, kurangnya sosialisasi oleh PLN, kepadatan penduduk yang rendah dan faktor geografis yang sulit dijangkau. Upaya yang dilakukan oleh Bappeda dan PLN adalah untuk meningkatkan standar peraturan untuk persiapan, pengelolaan, pengawasan, dan prosedur untuk penyediaan jaringan listrik pedesaan, dana desa, untuk membuat kebijakan khusus yang mengatur pengadaan jaringan listrik pedesaan dan desa yang belum didukung oleh listrik.

1. Pendahuluan

Di era modern ini perkembangan penggunaan listrik sangatlah melekat pada masyarakat, bahkan listrik seolah menjadi bagian yang penting untuk kehidupan, rasanya sangatlah mengesalkan dan sangatlah terganggu bila alus listrik sedang terjadi gangguan, masyarakat akan melalukan tindakan. Hampir seluruh kegiatan manusia selalu dibarengi dan dibantu oleh alat listrik, dari mulai memasak, penerangan, mencuci, menghangat air dan hampir seluruh alat bantu manusia yang ada di rumah bertenaga listrik.

Indonesia dengan segala kekayaan yang dimiliki, kekayaan terutama terletak di sektor bumi. Salah satu contoh seperti minyak bumi, gas dan air. Minyak bumi dan air adalah sebagai bahan utama untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok hampir setiap peralatan rumah tangga, industri maupun kantor menggunakan energi listrik di kota maupun di desa menggunakan listrik sebagai kebutuhan pokok. Tetapi di sisi lain efektifitas penggunaan listrik di desa belum optimal, masih banyak desa yang belum dialiri listrik.

Sudah umum dipahami bahwa listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan saat ini. Maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk menyediakan pelayanan listrik bagi seluruh penduduknya, jika masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera menjadi cita-cita bersama. Oleh sebab itu, mestinya ada upaya besar untuk menyediakan listrik bagi seluruh penduduk yang sampai saat ini belum terjangkau pelayanannya.

Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Bahwa penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratis dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan.

Untuk penyediaan tenaga listrik pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk:

- a. Kelompok masyarakat tidak mampu,

- b. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang,
- c. Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan,
- d. Pembangunan listrik perdesaan.

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Listrik sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat 2 Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang–undang ini menjelaskan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pelaksanaan koordinasi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan, agar proses pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Maka salah satu aspek yang diperhatikan adalah koordinasi dari aparat pemerintah daerah dan PT. PLN. Pemerintah daerah harus mengkoordinasikan kepada pihak PLN bahwa masih terdapatnya desa yang belum memiliki jaringan listrik, kemudian PT. PLN harus segera memprosesnya dan membangun jaringan listrik daerah pedesaan tersebut. Jika hal ini terjadi dengan baik tentunya pencapaian pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan serta di desa-desa terpencil pun dapat menikmati penerangan.

Namun pada kenyataannya di Indonesia saja masih banyak permasalahan kelistrikan yang terjadi antara lain:

- 1. Belum semua rakyat Indonesia bisa menikmati layanan listrik. Kapasitas pemasangan kwh meter tidak memadai untuk kebutuhan yang ada, dikarenakan oleh keterbatasan dana.
- 2. Biaya pokok produksi listrik Indonesia termasuk termahal di dunia.
- 3. Pertambahan pelanggan baru terus bertambah mengikuti pertumbuhan jumlah hunian / rumah baru terlebih lagi di daerah kota, namun ini tidak sejalan dengan pertumbuhan pembangkit listrik / kapasitas.

Hal ini sejalan dengan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bungo khususnya pada Desa Datar, Desa Sungai Telang Dan Desa Sangi, ketiga desa ini masih terdapat rumah warga yang belum dialiri listrik. hal ini disebabkan oleh:

- 1. Penduduknya yang masih sedikit,
- 2. Ketiga desa ini merupakan desa yang cukup jauh dari jaringan distribusi, tentunya akan memerlukan biaya yang besar, sedangkan dana tidak memadai.

Berikut nama desa yang belum dialiri listrik dan jumlah penduduk:

Tabel 1
Desa yang belum dilaliri listrik dan jumlah penduduk tahun 2017

No.	Nama Desa	Jumlah KK Yang Sudah Dialiri Listrik	Jumlah KK Yang Belum Dialiri Listrik	%
1.	Batu kerbau	185 KK	25 KK	11,90%
2	Datar	166 KK	30 KK	15,30%
3.	Pekan jum'at	158 KK	20 KK	11,30%
4.	Sungai telang	198 KK	42 KK	17,5%

5.	Timbolasi	192KK	38 KK	16,50%
6.	Muara buat	73 KK	47KK	39,16%
7.	Aur cino	530 KK	20 KK	3,63%
8.	Empelu	154 KK	36 KK	18, 94%

Sumber data: Bappeda dan PT. PLN Area Muara Bungo

Di desa Batu Kerbau terdapat 25 KK dari 210 KK yang belum teraliri listrik. Dikarenakan jangkauan rumah penduduk yang terlalu jauh ke dalam dan jalan yang buruk membuat petugas PLN susah untuk menjangkaunya.

Sedangkan di desa Datar terdapat 30 KK dari 196 KK yang belum dialiri listrik. Dikarenakan jangkauan rumah warga yang jauh ke dalam sehingga memerlukan tiang dan kabel tambahan, tentunya ini memerlukan biaya tambahan. Sedangkan 30 KK ini termasuk masyarakat miskin.

Di dusun Pekan Jum'at terdapat 20 KK dari 178 KK yang belum dialiri listrik, dikarenakan jangkauan rumah terlalu masuk ke dalam. Tentunya memerlukan biaya tambahan sedangkan di dusun Pekan Jum'at mayoritas warganya hanya petani karet, untuk saat ini saja harga karet naik turun mereka tidak punya cukup biaya jika ada biaya tambahan.

Untuk di desa Telang, Timbolasi, Muara Buat, dan Aur Cino memiliki masalah yang sama, untuk rumah yang belum dialiri listrik dikarenakan jangkauan tempat tinggal mereka yang jauh dari jangkauan jaringan distribusi PLN. Tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit sedangkan untuk saat ini PLN kekurangan biaya.

Untuk itu pemerintah daerah perlu memperhatikan desa-desa yang belum dialiri listrik, pemerintah daerah melalui badan perencanaan pembangunan daerah dan PLN serta melibatkan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), untuk menjalin koordinasi yang baik agar terwujudnya pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Adapun fenomena-fenomena atas masalah yang dapat diamati:

1. Masih adanya desa yang belum dialiri arus listrik.
2. Kurang intensnya koordinasi, karena terbentur antara program PLN dan Pemerintah Daerah.
3. Jangkauan desa dari jaringan distribusi terlalu jauh sehingga membutuhkan biaya yang besar.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan koordinasi Pemerintah Daerah dan PLN dalam pengadaan jaringan listrik pedesaan ?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dan PLN dalam melaksanakan pengadaan jaringan listrik pedesaan ?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala Pemerintah Daerah dan PLN dalam melaksanakan pengadaan jaringan listrik pedesaan?

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulisan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Daerah dan PLN saat ini. Sesuai dengan judul penelitian, bahwa yang dijadikan populasi antara lain meliputi pimpinan PLN, kepala Bappeda, masyarakat desa yang belum dialiri listrik. Unit analisis adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo,
2. Kepala Bidang Bappeda Kabupaten Bungo,
3. Manajer PT. PLN Area Muara Bungo,
4. Asisten Manajer PT. PLN Area Muara Bungo,

5. Rio Desa Datar,
6. Rio Desa Sungai Telang,
7. Rio Desa Sangi.

Dalam penetapan sampel, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Melalui tehknik ini peneliti berharap penelitian ini dapat memperoleh hasil dan memberikan suatu fungsi positif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan koordinasi pemerintah daerah dan PT. PLN dalam pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan.

Dalam pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan tentunya pemerintah daerah dan PLN harus menjalankan koordinasi yang baik dan efektif, guna mencapai kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat desa dalam pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan.

Dengan adanya koordinasi diharapkan tidak terjadi pekerjaan tumpang tindih antara Pemerintah Daerah dan PLN, tanpa koordinasi sulit diharapkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Jika Pemerintah Daerah dan PLN tidak sinkron dalam pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan tentunya masyarakat desa tidak akan menikmati penerangan sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bappeda ”pelaksanaan koordinasi pemerintah daerah melalui Bappeda dan PT. PLN, koordinasi yang terjalin di antara kedua lembaga ini berjalan dengan baik. Kemudian beliau mengatakan bahwa, Pihak Bappeda hanya mengusulkan kepada PT. PLN bahwa masih terdapat desa yang belum dibangun jaringan listrik, kemudian pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh PT. PLN, dan PT. PLN mempunyai rencana kerja sendiri.

Dari pernyataan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa koordinasi antara Bappeda dan PT. PLN dengan baik, tetapi kebijakan pemerintah melalui Bappeda tentang pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan hanya sebatas pengusulan program pembangunan jaringan listrik pedesaan saja. Kemudian pihak PLN akan memprosesnya dan segera membangun jaringan listrik di desa yang disarankan oleh pemerintah daerah. Akan tetapi koordinasi ini berjalan baik hanya pada teorinya saja pada prakteknya belum efektif, hal ini dapat dilihat dari masih adanya desa yang belum memiliki jaringan listrik dan masyarakat desa yang belum dialiri listrik.

3.2 Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dan PT.PLN dalam melaksanakan pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan.

1. Kebijakan Pemerintah Tentang Pembebasan Lahan.

Untuk mengatasi masalah dalam pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan tentunya memerlukan kebijakan yang tegas di mana kebijakan sebagai tindakan yang mempunyai tujuan yang diikuti dan dilaksanakan guna memecahkan suatu masalah tertentu, dalam pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi karena masalah kebijakan yang menghambat percepatan pembangunan infrastruktur jaringan listrik hingga kedesa yang jauh dari jangkauan jaringan distribusi PLN.

Masalah yang menyangkut kebijakan khususnya dalam pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan salah satu kendalanya adalah pembebasan lahan / tanah, warga desa tidak mengizinkan petugas PLN untuk menegakkan tiang di tanah mereka tentunya pembangunan jaringan listrik tidak berjalan dengan baik karena kebijakan tidak mendukung. Tanpa kebijakan dari pemerintah tentunya PLN akan kesulitan untuk membangun jaringan dan desa yang jauh dari jangkauan jaringan distribusi PLN tidak dapat menikmati penerangan sesuai target yang telah direncanakan.

2. Infrastruktur kelistrikan perlu diadakan sosialisasi teknis tentang pengadaan jaringan listrik.

Sosialisasi harus dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada warga desa tentang pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan, tentang standarisasi pengadaan jaringan dan

manfaat listrik. Khususnya tentang standarisasi pemasangan jaringan listrik, misalnya tentang jarak tiang harus 20 meter dari gardu induk, jarak tiang dari jalan harus 5 meter ke dalam. Jika tiang sudah berdiri maka tiap bulan petugas PLN harus membersihkan tiang dari ranting-ranting yang ada, hal ini untuk mengantisipasi tiang dari masalah, misalnya konslet karena ranting melilit kabel. Dengan adanya sosialisasi ini tentunya memperkecil hambatan yang terjadi di lapangan dan mempermudah pembangunan infrastruktur jaringan listrik.

3. Sedikitnya jumlah penduduk dan faktor geografis yang sulit dijangkau.

Kondisi kelistrikan saat ini masih dirasakan belum memenuhi azas keadilan dan pemerataan, dapat dipahami ketersediaan listrik dari waktu ke waktu selalu lebih kecil dari kebutuhan yang terus meningkat baik di kota maupun di desa. Jika listrik sudah masuk kedesa akan menumbuhkembangkan perekonomian lokal, kegiatan usaha berjalan pendapatan masyarakat meningkat dan dapat mensejahterakan masyarakat. Dengan listrik masyarakat di daerah terpencil akan menikmati akses atas penerangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja luas, tingkat keamanan yang lebih terjamin.

Melistriki desa yang letaknya jauh dan dipelosok tentunya memerlukan biaya yang besar. Populasi penduduk umumnya sedikit dengan tingkat pendapatan yang rendah, membangun jaringan listrik PLN kedesa seperti itu menjadi mahal, terlebih lagi infrastruktur jalan yang buruk untuk itu membutuhkan keterlibatan pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang baik untuk kelancaran pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer PT. PLN Area Muara Bungo mengatakan “untuk desa yang sulit dijangkau dengan kondisi jalan yang tidak bagus memang menjadi pr PLN untuk mengaliri listrik, terlebih lagi pasti memerlukan biaya yang banyak”. Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Manajer Perencanaan PT. PLN Area Muara Bungo beliau mengatakan “dengan infrastruktur jalan yang buruk membuat kesulitan bagi PLN untuk membangun jaringan listrik didesa pelosok, dibutuhkan kerja yang ekstra dalam membawa tiang kelokasi karena terbentur jalan yang buruk. Saya berharap agar pemerintah memperbaiki jalan untuk mempermudah petugas PLN dalam proses pembangunan demi tujuan bersama”.

3.3 Upaya-upaya yang dihadapi Pemerintah Daerah dan PT. PLN dalam melaksanakan pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan.

1. Meningkatkan standar regulasi penyusunan pengelolaan, pengawasan, dan tata cara pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas untuk melaksanakan dan mendukung kelancaran pembangunan serta program – program pemerintah, Bappeda Kabupaten Bungo memiliki tugas pokok dan fungsi yang secara umum mendasari pelaksanaan tugas sehari-hari. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum menjadi salah satu upaya dan pencegahan tidak tercapainya tujuan.

Dalam melaksanakan setiap kegiatan agar berjalan sesuai rencana dan dengan hasil yang memuaskan, tentunya harus membuat penyusunan rencana kegiatan yang matang. Serta pengelolaan yang maksimal, Pengawasan sangat penting dalam melaksanakan kegiatan karena proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktifitas yang terselenggara telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bappeda mengatakan “membangun regulasi dalam bentuk himbauan kepada masyarakat desa, dalam bentuk penguatan jurnal dan teknis. Serta membantu dalam bentuk menyediakan dokumen-dokumen teknis atau syarat-syarat pengajuan pembangunan jaringan listrik”. Selanjutnya menurut Kepala Sarana dan Prasarana “meningkatkan kebijakan tentang dana untuk pln dalam pengadaan jaringan listrik pedesaan, tetapi harus bisa mempertanggungjawabkan serta transparan. Pemerintah daerah juga membangun regulasi dan diorientasinya pada dana desa, desa bisa menggunakan dana desa untuk membantu warganya yang belum mempunyai amper, tetapi hanya untuk warga yang tidak mampu saja”.

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Asisten Manajer Perencanaan PT. PLN Area Muara Bungo mengatakan bahwa “pihak PLN akan melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, dengan membuat rencana kerja yang matang dan kami tidak mempersulit masyarakat dalam mengajukan permohonan pengadaan jaringan listrik asal memenuhi persyaratan”.

2. Membuat kebijakan khusus yang mengatur tentang pengadaan jaringan listrik serta desa yang belum dialiri listrik.

Ketersediaan listrik menjadi bagian penting faktor pendorong daya ekonomi masyarakat bahkan masyarakat desa, selama ini kebutuhan listrik di daerah desa masih sangat kekurangan, Kebijakan pemerintah harus sejalan dengan tujuan agar dapat memberikan pasokan listrik kewilayah yang sulit dijangkau.

Untuk desa yang sulit dijangkau memang memerlukan kebijakan khusus, karena desa di wilayah ini umum mempunyai infrastruktur jalan yang buruk membutuhkan biaya yang besar, untuk itu membutuhkan keterlibatan pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang baik untuk kelancaran pembangunan.

Untuk merealisasikan masyarakat desa yang sejahtera tentunya memerlukan kebijakan khusus, kebijakan yang mengatur tentang pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan. Survey jaringan distribusi di desa yang belum belistri, melakukan rapat koordinasi sinkronisasi data-data antara pemerintah daerah dan PLN dengan mendata desa mana yang belum memiliki jaringan listrik dan desa mana saja yang masyarakatnya belum menikmati penerangan. Dengan kelengkapan data mempermudah program kerja PLN dan akan terealisasinya pemerataan pembangunan infrastruktur jaringan listrik daerah pedesaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer PT. PLN Area Muara Bungo mengatakan bahwa “dengan membuat kebijakan khusus tentang pengadaan jaringan listrik serta desa yang belum dialiri listrik sejak dini, kemudian melakukan berbagai langkah dan inovasi penunjang serta diimplementasikan secara benar pada sisi perencanaan, pengadaan, operasi serta semangat kerja saya rasa permasalahan listrik pedesaan akan selesai”.

4. Kesimpulan

1. Pelaksanaan koordinasi Pemerintah Daerah dan Perusahaan Listrik Negara dalam pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan pada teorinya sudah berjalan dengan baik, akan tetapi pada prakteknya belum efektif dikarenakan masih terdapatnya desa yang belum memiliki jaringan listrik dan masih terdapatnya masyarakat yang belum dialiri listrik.
2. Pemerintah Daerah melalui Bappeda dan PT. PLN dihadapkan oleh beberapa kendala dalam melaksanakan pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pihak Bappeda tidak mempunyai kebijakan langsung untuk membangun jaringan listrik daerah pedesaan, akan tetapi PT. PLN lah yang mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk membangun jaringan listrik daerah pedesaan.
 - b. PT. PLN berharap pihak pemerintah harus mempertegas kebijakan tentang pembebasan tanah atau lahan didesa yang akan dibangun jaringan listrik guna memperlancar pembangunan.
 - c. Kurangnya sosialisasi oleh PLN. Kurangnya pemahaman warga desa tentang manfaat pembangunan jaringan listrik, dan biasanya warga desa tidak mengizinkan tanah mereka untuk ditegakkan tiang hal ini memperlambat pembangunan dan saya juga berharap tentunya pemerintah dapat membantu PLN dalam hal ini serta mendukung sepenuhnya pada kemudahan perizinan pembangunan dan saat penarikan kabel dan penentuan lokasi gardu.
 - d. Sedikitnya Jumlah Penduduk dan faktor geografis yang sulit dijangkau.
3. Upaya yang dilakukan Bappeda dan PT. PLN dalam pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan standar regulasi penyusunan, pengelolaan, pengawasan, dan tata cara pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan.

- b. Pemerintah Daerah menyediakan dana desa untuk listrik pedesaan, dana Pemerintah Kabupaten yang diperuntukkan untuk desa yang berbentuk Gerakan Dusun Membangun.
- c. Membuat kebijakan khusus yang mengatur tentang pengadaan jaringan listrik dan desa yang belum dialiri listrik.

Saran

1. Dalam pelaksanaan koordinasi Bappeda dan PT. PLN ada baiknya jika pihak PLN dan BAPPEDA memiliki target kerja yang sama dan menjalin koordinasi yang lebih intens dan efektif dalam pengadaan jaringan listrik daerah pedesaan, guna mempercepat pembangunan serta untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat desa.
2. Dalam mengatasi kendala yang terjadi diharapkan Bappeda dan PT. PLN lebih tegas, dan maksimal dalam menjalankan tugasnya agar kendala-kendala yang dihadapi dapat cepat terselesaikan.
3. Diharapkan untuk upaya Bappeda dan PT. PLN dapat terrealisasikan dengan baik, agar warga desa dapat menikmati penerangan seperti yang kita rasakan.

Daftar Pustaka

- Abu Daud Busroh, (2010). *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Adon Nasrullah Jamaludi, (2015). *Sosiologi Perdesaan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Basrowi & Suwandi, (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chirs Woodford, (2016). *Jejak Sejarah Sain Listrik*, Pakar Raya, Bandung.
- Dede Jajang Suyaman, (2016). *Manajemen Kewirausahaan Masyarakat Desa*, Alfabeta, Bandung.
- Husaini Usman, (2008). *Manajemen Teori,Praktik, Dan Riset Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta Timur.
- Inu Kencana Syafie, (2013). *Ilmu Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Inu Kencana Syafiie, (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jhon B Robertson, (2003). *Keterampilan Teknik Listrik Praktis*, Yrama Widya, Bandung.
- Sri Rejeki Hartono et al., (2010). *Kamus Hukum Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Soerjono, (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Taliziduhu Ndraha, (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Waluyo, (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi Dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, Mandar Maju, Sumedang.
- Yayat M. Herujito, (2008). *Dasar-Dasar Manajemen*, Grasindo, Jakarta.